**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kesejahteraan Sosial**

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan suatu konsep yang relatif berkembang, terutama di negara-negara berkembang. Masalah sosial merupakan suatu permasalahan yang sudah lama sepanjang kehidupan manusia. Negara-negara maju dan negara industri sekarang ini, masalah sosial di rasakan sangat berat dan mengganggu perkembangan msyarakat, sehingga diperlukan sistem pelayanan sosial yang teratur. Menurut Walter A. Friedlander dalam Salamah (2011:4) bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah:

Sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan- kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pertolongan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan, standar kehidupannya dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial baik pribadi maupun kelompok dimana kebutuhan keluarga dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Banyak pengertian kesejahteraan sosial yang dirumuskan selain yang di atas baik dalam pelayanannya, penanganannya atau dalam intervensinya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Melaui program dari pemerintah, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Menurut UU No.6 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang dikutip Fahrudin (2012: 9) definisi kesejahteraan sosial adalah: “Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Definisi di atas menunjukan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang berintikan lembaga dan pelayanan untuk membantu individu, kelompok mencapai kebutuhan hidup. Dimana dalam hal ini berkaitan dengan petani, pertain yang sangat memerlukan bimbingan dari kolompok maupun pemerintah melalui pekerja sosial yang tergabung dalam program UPPB karena bergerak di bidang yang memberikan dampingan bagi petani untuk meningkatkan keberhasilan petani.

# Tujuan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 pasal 3 bahwa tujuan penyelenggara kesejahateraan sosial sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggara kesejahetraan sosial
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan

Penjelasan yang pertama adalah tercukupinya kebutuhan dasar dalam menjalankan kelangsungan hidup seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan,pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dilingkungan masyarakat. Penjelasan yang kedua adalah mengembalikan keberfungsian sosialnya di dalam masyarakat, dimana sebelumnya mempunyai masalah sosial. Penjelasan yang ketiga adalah menjaga dan mempertahankan kesejahteraan sosialnya pada saat mempunyai permasalahan dan masalah tersebut bisa dicegah dan ditangani. Penjelasan yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan dan peduli kepada orang-orang yang mempunyai masalah sosial untuk ditangani. Penjelasan yang kelima adalah meningkatkan kualitas terlaksananya kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang mempunyai masalah sosial.

# Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, mengindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial negative akbibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. menurut Friedlander dan Apte, (1982) dalam Fahrudin (2012:12) fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut adalah:

* + 1. Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.

* + 1. Fungsi Penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

* + 1. Fungsi Pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam prosen pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

* + 1. Fungsi Penunjang (*supporti*ve)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

Bedasarkan uraiaan di atas, fungsi pelayanan sosial pada hakikatnya adalah mencegah serta menaggulangi masalah-masalah sosial yang terkait dengan kesejahteraan sosial bagi individu, kelompok dan masyarakat, dimana sebagai investasi untuk mencapai tujuan pelayanan sosial.

# Tinjauan Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial

* 1. **Pengertian Usaha Kesejahteraan Sosial**

Pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas biasanya disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial. Suharto (2010:4) mendefinisikan usaha kesejahteraan sosial yaitu: “Usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial”. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, usaha kesejahteraan sosial merupakan bentuk intervensi pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

# Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial

Tujuan usaha kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Menurut Suharto (2010:4), tujuan usaha kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

* + 1. Peningkatan standar hidup
    2. Peningkatan keberdayaan
    3. Penyempurnaan kebebasan

Adapun penjelasan dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan standar hidup melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
2. Meningkatkan keberdayaan, melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

# Fokus Usaha Kesejahteraan Sosial

Merujuk pada definisi *welfare* dari Howard Jones (1990) dalam Suharto (2010:8), “Tujuan utama usaha kesejahteraan sosial yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya”. Makna “kemiskinan dalam berbagai manifestasinya” tidak hanya menunjuk pada “kemiskinan fisik”, seperti rendahnya pendapatan atau rumah tidak layak huni, melainkan pula mencakup bentuk ketidakmampuan dalam menjalankan hasil usaha, seperti pengaolahan, pemasaran. Suharto (2010:9) mengungkapkan bahwa: “Usaha kesejahteraan sosial memfokuskan kegiatannya pada tiga bidang, yaitu: pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat”. Maksudnya, usaha kesejahteraan berfokus pada beberapa pelayanan yang ada pada pemerintah seperti memberdayakan masyarakat.

# Tinjauan Tentang Pelayanan Sosial

* 1. **Pengertian Pelayanan Sosial**

Kesejahteraan sosial mencakup pelayanan-pelayanan sosial yang terdapat di masyarakat sebagai upaya atau tindakan dalam membantu mengatasi permasalahan-permasalahan agar terjalin sebuah keberfungsian sosial (*social functioning*) seseorang baik secara individu maupun kelompok. Pelayanan sosial menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, United Nations, Economic Bulletin for Latin America, (dalam Soetarso, 2011: 79) yaitu:

1. Perbaikan secara terus-menerus kondisi-kondisi kehidupan orang.
2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi.
3. Peningkatan orientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyusaian diri.
4. Pemanfaat dan penciptakan sumber-sumber kemasyarakatan untuk tujuan-tujuan pembanguan
5. Penyediaan struktur-struktur kelembagaan bagi berfungsinya pelayanan-pelayanan yang terorganisasi lainnya.

Definisi di atas pelayanan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu-individu dalam masyrakat yang memiliki permasalahan-permasalahan sosial agar mereka dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya.

Pelayanan sosial merupakan pelayanan yang memberikan bantuan kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial baik di luar maupun dari dirinya. Pelayanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang dalam memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Pelayanan sosial menurut Khan (Fahrudin, 2012:51) adalah:

Pelayanan Sosial adalah konteks kelembagaan yang sebagai terdiri atas program-program yang disediakan bedasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan- pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Pelayanan sosial dapat dicapai dengan cara yang bersifat informasi, bimbingan dan pertolongan dapat dicapai dengan cara yang bersifat informasi, bimbingan dan pertolongan melalui berbagai bentuk kegiatan yang berkenaan dengan pemecahan masalahnya.

# Bidang-bidang Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan wujud aktifitas Pekerja Sosial dalam praktik profesionalnya. Pelayanan sosial merupakan jawaban terhadap tuntutan kebutuhan dan masalah yang dialami masyrakat sebagai akibat perubahan yang dialami masyrakat itu sendiri. Dengan demikian bidang-bidang pelayanan sosial akan tergantung bagaimana Pekerja Soial memandang dan mengidentifikasikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Jika cakupan maslah sosial telah mengalami perluasan dari masalah sosial-ekonomi kepada masalah sosial- psikologis, maka cakupan pelayanan sosial juga harus demikian. Jika masalah dikategoirikan menjadi masalah disorganisasi sosial dan penyimpangan perilaku (Merton & Nisbet,1978), maka bidang-bidang pelayanan sosial harus pula mencakup pelayanan klinis sampai kepenataan sistem masyarakat itu sendiri. Apabial mengutip dari Merton dan Nisbet (1976) yang dikutip Wibhawa (2010: 76-77) mendefinisikan bidang-bidang pelayanan sosial adalah:

1. Perilaku Menyimpang (*Deviant beharvior*)
   1. Tindakan kejahatan dan kenakalan remaja (*Crime and juvenille Deliquency).*
   2. Ganguan-gangguan mental (*mental disorders)*
   3. Penggunaan obat-obatan terlarang (*drugs abuse)*
   4. Kecanduan alkohol dan permabukan (*alcoholism and dringking*)
   5. Perilaku seksual (*sexual beharvior)*
2. Disorganisasi sosial (*social disorganization)*
   1. Krisis kependudukan dunia (*the world’s population crisis*)
   2. Kesetaraan dan ketidaksetaraan (*equality and inequality)*
   3. Lansia (*age and aging)*
   4. Peranan-penanan seksual (*sex roles)*
   5. Ras dan hubungan antar kelompok di dalam masyarakat (*Race and intergroup relation*)
   6. Disorganisasi Keluarga (*Familiy disorganization*)
   7. Disorganisasi komunitas dan masalah-masalah perkotaan (*comunity disorganization and urban problems)*
   8. Dunia pekerjaan (*the world of work)*
   9. Kemeiskinan dan proletariat (*provement and proletariat)*
   10. Kekerasan Kolektif (*Collective violence)*

Masalah sosial pada suatu masyarakat akan terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, jenis dan variasi serta penilaian tentang masalah sosial mungkin tidak sama pada berbagai masyarakat. Namun demikian untuk kepentingan identifikasi masalah sosial, hal yang paling penting adalah adanya kesamaan tentang pengertian konsep masalah sosial tersebut. Pelayanan sosial diselenggarakan untuk menjawab tantangan kebutuhan dan masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

# Intervensi Tentang Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Masalah Keterpurukan Petani

* 1. **Latar Belakang Pekerja Sosial**

Pekerja sosial sebagai pengemban profesi memiliki peranan-peranan yang harus dijalankan sehubungan dengan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai permasalahan peserta Program UPPB dalam pemenuhan kebutuhannya ditengah kondisi ekonomi yang masih kurang yang bertujuan sebagai sarana bagi petani untuk meningkatkan mutu karetnya.

Untuk mengetahui peran-peran tersebut, maka terlebih dahulu dijelaskan pengertian pekerjaan sosial dikemukakan oleh asosiasi nasional pekerja sosial Amerika Serikat (NASW) yang dikutip Fahrudin (2012:60) pekerjaan sosial dirumuskan sebagai berikut:

*Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consist of the professional application of social work values, principles, and techniques to one or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counseling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural institutions; and of interaction of all these factors*.

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan peofesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan berikut : membantu orang memperoleh pelayanan-pelayanan nyata, memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu-individu, keluarga- keluarga, dan kelompok-kelompok, membantu komunitas atau kelompok memberikan atau memperbaiki pelayanan-pelayanan sosial dan kesehatan; dan ikut serta dalam proses-proses legislatif yang berkaitan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia tentang institusi-institusi sosial, ekonomi, dan kultural; dan tentang interaksi antara semua faktor ini.

Pekerjaan sosial pada Program UPPB mempunyai perhatian utama dalam meningkatkan atau memulihkan petani individu, kelompok, dan komunitas. Tidak hanya itu pekerjaan sosial memberikan pelayanan-pelayanan bagi individu atau kelompok tersebut dalam mewujudkan aspirasi-aspirasi mereka. dan pekerjaan sosial harus mengetahui perkembangan dan prilaku manusia baik interaksi dengan lingkungan sosialnya, sehingga bisa memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka.

# Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang, sehingga orang tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, mengatasi kesulitannya, dan mewujudkan aspirasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tujuan pekerjaan sosial menurut Dubois dan Miley (2005) dalam Suharto (2007:5), sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi, perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan- kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem- sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan- pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Berdasarkan penjelasan pertama adalah pekerja sosial harus bisa membangun kemampuan klien untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Penjelasan yang kedua pekerja sosial membantu menghubungkan klien ke pelayanan sosial lembaga untuk diberikan pemecahan masalahnya. Penjelasan yang ketiga adalah pekerja sosial menyampaikan masukan-masukan kepada pelayanan sosial lembaga untuk memperbaiki kefektifan pelayanan tersebut. Penjelasan keempat adalah pekerja sosial membantu mengembangkan dan memperbaiki kebijakan-kebijakan sosial, baik itu kebijakan pemerintah dan kebijakan pelayanan lembaga.

# Keberfungsian Sosial

Pekerjaan sosial berusaha untuk memperbaiki, meningkatkan atau mempertahankan keberfungsian sosial orang, kelompok, dan masyarakat, menurut Siporin (1975) dalam Fahrudin (2012:62) keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas seperi keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya berprilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka. Karena orang berfungsi dalam arti peranan-peranan sosial mereka, maka keberfungsian sosial menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dipandang pokok untuk pelaksanaan beberapa peranan yang, karena keanggotaanya dalam kelompok-kelompok sosial setiap orang diminta melakukannya.

Penjelasan di atas keberfungsian sosial merupakan peranan-peranan individu, kelompok, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan. Menurut Suharto (2005:27) kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan meningkatkan keberfungsian sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut:

* 1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
  2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
  3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan.
  4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya kemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Berdasarkan pernyataan di atas bagaimana seorang pekerjaan sosial harus bisa memperbaiki atau mengembangkan keberfungsian petani karet dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

# Metode Pekerjaan Sosial

Metode Pekerjaan Sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Penanganannya dari permasalahan individu, kelompok, dan masyarakat. Metode yang digunakan oleh peksos sebagai berikut :

a. Bimbingan Sosial Perorangan (*Social Case Work*)

Bimbingan sosial perorangan menurut Swift yang dikutip oleh Muhidin (1992:11) adalah seni untuk membantu individu dalam mengembangkan dan menggunakan kemampuan pribadinya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan sosialnya.

Berdasarkan definisi di atas metode ini diperuntukkan kepada seorang individu yang dalam kehidupannya mengalami masalah sosial. Seorang pekerja sosial harus bisa menangani masalah yang didapat indivdiu tersebut melalui pendekatan untuk mengembangkan dan memecahkan masalah individu tersebut. Dalam memecahkannya seorang peksos harus mempunyai keahlian dan keterampilan dalam relasi pekerja sosial dengan klien. Prinsip dasar pada bimbingan sosial perseorangan adalah:

* 1. Penerimaan, seorang pekerja sosial harus mau menerima dan menghormati penerima pelayanan (klien) dalam setiap kondisi yang dialaminya.
  2. Komunikasi, antara pekerja sosial dan klien harus saling memberi dan menerima informasi.
  3. Individualisasi, pekerja sosial harus memahami, menerima bahwa klien sebagai pribadi yang unik, dalam arti berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya.
  4. Pertisipasi, pekerja sosial harus ikut serta secara langsung dalam membantu mengatasi permasalahan klien.
  5. Kerahasiaan, pekerja sosial harus mampu merahasiakan informasi yang diberikan oleh klien.
  6. Kesadaran diri, sebagai manusia pekerja sosial menyadari akan respon klien serta motivasi dan relasi bantuan profesional.

1. Bimbingan Sosial Kelompok (*Social Group Work*)

Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Jadi bimbingan sosial kelompok digunakan untuk membantu individu dalam mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok/lingkungan sosialnya dengan kondisi tertentu atau membantu kelompok mencapai tujuannya. Bimbingan sosial kelompok menurut Tacter yang dikutip oleh Muhidin (1992:11) menyatakan bahwa :

Bimbingan sosial kelompok adalah suatu metode dimana individu-individu kelompok dari lembaga sosial dibantu oleh seorang pekerja sosial atau petugas yang membimbing interaksi didalam program kegiatan sehingga mereka dapat menghubungkan diri dengan satu yang lain dan kesempatan untuk mengembangkan pengalamannya selaras dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk tujuan mengembangkan individu, kelompok dan masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas individu-individu yang mempunyai permasalahan yang sama dibentuk menjadi kelompok. Pekerja sosial membimbing kelompok tersebut untuk mengembangkan interaksi satu sama lain sehingga terciptanya keselarasan kebutuhan yang ingin dipenuhi kelompok tersebut dalam pemecahan masalahnya. Prinsip dasar pada bimbingan sosial kelompok adalah :

* 1. Pembentukan kelompok secara terencana. Kelompok merupakan satu kesatuan dimana individu memperoleh pelayanan untuk mengembangkan pribadinya. Kelompok yang telah terbentuk, maka badan sosial yang menerima kelompok dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan situasi kelompok, terutama yang dapat memberikan kemungkinan untuk perkembangan individu menuju ke arah positif dalam pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok.
  2. Memiliki tujuan yang akan dicapai bersama. Di dalam bimbingan sosial kelompok tujuan, perkembangan individu dan kelompok harus dirumuskan dengan cermat oleh pembimbing kelompok agar terdapat keserasian antara harapan dan kemampuan kelompok.
  3. Penciptaan interaksi terpimpin. Dalam bimbingan sosial kelompok harus dibina hubungan yang bertujuan antara pekerja sosial dengan anggota-anggota kelompok dan atas dasar keyakinan bahwa pekerja sosial akan menerima anggota kelompok sebagaimana adanya.
  4. Pengambilan keputusan. Kelompok harus dibantu dalam mengambil keputusan-keputusan sendiri dan menentukan kegiatan yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya.
  5. Organisasi bersifat fleksibel dalam arti organisasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Organisasi yang formal harus fleksibel dan harus didorong bila sedang berusaha mencapai tujuan yang penting, yang dipahami oleh para anggotanya dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.
  6. Penggalian sumber-sumber dan penyusunan program. Sumber yang ada di masyarakat harus dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman kelompok, untuk dimanfaatkan para anggota dan kelompok itu sendiri. Penilaian kegiatan secara terus-menerus terhadap proses dan hasil program atau pekerjaan kelompok yang merupakan jaminan dan pertanggungjawaban terhadap apa yang diselesaikan masing-masing pihak untuk keseluruhan.

3. Bimbingan Sosial Masyarakat

Bimbingan sosial dengan masyarakat sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat serta menekankan dengan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat. Upaya tersebut cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan bidang tertentu di masyarakat seperti kesejahteraan keluarga dan lain sebagainya. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah:

1. Penyusunan program didasarkan kebutuhan nyata yang mendesak di masyarakat.
2. Partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat.
3. Bekerja sama dengan berbagai badan dalam rangka keberhasilan bersama dalam pelaksanaan program.
4. Titik berat program adalah upaya untuk pencegahan, rehabilitasi, pemulihan, pengembangan dan dukungan.

# Fungsi dan Tugas Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial di dalam pencapaian tujuan, yaitu memecahkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat maupun dalam mengubungkan orang dengan sistem sumber, perlu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai pekerja sosial. Fungsi pekerjaan sosial menurut Siporin (1975) dalam Huraerah (2011:40), yaitu sebagai berikut :

* 1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
  2. Menjamin memadainya standar-standar subsitensi, kesehatan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan mereka di dalam institusi-institusi sosial.
  3. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial serta struktur institusi masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas bahwa fungsi dan tugas pekerja sosial yang berhubungan dengan kebutuhan dasar pertain karet adalah mengembangkan, memelihara, dan mendorong petani tersebut dalam memperkuat kesejahteraan sosialnya melalui permodalan dan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah dalam pemanfaatan bantuan yang digunakan secara baik.

1. **Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar**

**1. Definisi UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar)**

Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang selanjutnya disebut (UPPB) menurut Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 23 Tahun 2016 adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran bokar. UPPB ini dilatar belakangi oleh penurunan harga Bahan Olah Karet (BOKAR) di tingkat petani demikian terasa sejak awal tahun 2016 dan tidak kunjung membaik hingga kini. Keadaan ini dibarengi juga dengan meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok sehingga makin memberatkan dan menambah beban hidup bagi petani karet. Dengan anjloknya harga Bahan Olah Karet (BOKAR) tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berusaha mengatasi masalah ini dengan meningkatkan mutu Bahan Olah Karet (BOKAR) petani melalui penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani sehingga terwujudnya peningkatan nilai ekonomi bagi petani karet, maka pemerintah tanah bumbu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Peningkatan Mutu Bahan Olah Karet (BOKAR) Melalui Penataan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani yang direalisasikan dalam UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar).

UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) bertujuan sebagai sarana bagi petani untuk meningkatkan mutu karetnya. Artikel ini membahas mengenai penerapan UPPB di Sumatera Selatan serta permasalahan yang terkait dengan program nasional perbaikan mutu karet alam, tindaklanjut GNBB dan terbentuknya kelompok-kelompok UPPB di beberapa wilayah sentra perkebunan rakyat. Pembentukan UPPB memberikan beberapa manfaat, diantaranya: adanya aturan yang disepakati secara musyawarah; meningkatnya mutu bokar petani melalui pemasaran bersama; meningkatkan posisi tawar bagi petani; media komunikasi petani agar dapat turut serta dalam program-program pengembangan karet rakyat.

**2. Ruang Lingkup UPPB**

Ruang lingkup UPPB ini meliputi :

* 1. Kelembagaan petani;
  2. pengolahan BOKAR;
  3. pemasaran BOKAR; dan
  4. pembinaan dan Pengawasan.

1. **Kelembagaan Petani**

Untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dalam pengolahan dan pemasaran BOKAR dibentuk kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). UPPB sebagaimana dimaksud dapat dibentuk oleh satu atau lebih kelompok pekebun. Pembentukan UPPB didasarkan pada luasan kebun paling kurang 100 hektar dan jumlah produksi lateks paling kurang 800 kilogram karet kering setiap 3 (tiga) hari dan/atau 1 (satu) desa 1 (satu) unit UPPB. Tata cara pembentukan UPPB mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku

UPPB mempunyai fungsi pelayanan kegiatan teknis dan pengembangan usaha kelompok pekebun dalam pengolahan dan pemasaran BOKAR. Kegiatan teknis dalam UPPB meliputi pengembangan ketrampilan penyadapan, penggunaan peralatan, pelaksanaan dan pengolahan dan pemasaran, serta pengenalan baku mutu. Sedangkan Kegiatan pengembangan usaha dilakukan dengan mitra usaha antara lain meliputi kerjasama penyediaan bahan penggumpal, sarana produksi, pemasaran, transportasi, dan permodalan

UPPB diselenggarakan oleh suatu kepengurusan yang terdiri atas ketua sekretaris dan bendahara. Ketua, Sekretaris dan bendahara tidak boleh dirangkap oleh pengurus kelompok pekebun. Ketua UPPB dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada anggota kelompok pekebun.Tugas, fungsi dan kepengurusan UPPB lebih lanjut dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun dan ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota kelompok pekebun. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, UPPB dilengkapi dengan sarana kerja peralatan pengolahan sederhana berupa bak pembeku, mesin gilingan tangan (*hand-mangel*) barak pengeringan Bokar, dan penyediaan fasilitas bahan penggumpal dan bahan pengawet. Jenis dan jumlah sarana kerja UPPB disesuaikan dengan jenis Bokar yang diproduksi pekebun setempat.

Selain fasilitas sarana kerja, untuk setiap UPPB dilengkapi dengan tenaga teknis yang berasal dari salah satu anggota pekebun yang sudah terlatih. Tenaga teknis memberikan pelayanan dan pendampingan bagi pekebun dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran Bokar. Fasilitasi sarana kerja, bahan penggumpal dan pendampingan teknis pada UPPB diberikan dalam bentuk paket pelayanan yang utuh dan tidak terpisah-pisah.

Setiap anggota kelompok dalam mengolah BOKAR dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di UPPB.Anggota kelompok dalam Pengolahan BOKAR mendapat bimbingan dan pengawasan dari petugas teknis UPPB.

Hasil olah BOKAR selanjutnya diadministrasikan dan disimpan di gudang UPPB untuk dipasarkan. UPPB yang telah didaftar berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten. Laporan paling kurang meliputi jenis jumlah produksi, mutu, harga dan pembeli BOKAR. UPPB yang telah didaftar, wajib memiliki Surat Tanda Registrasi-Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (STR-UPPB) yang merupakan dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

1. **Pengolahan Bokar**

Bahan Olah Karet yang selanjutnya disebut Bokar adalah lateks dan/atau gumpalan yang dihasilkan pekebun, kemudian diolah secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.Lateks adalah getah segar berbentuk cair dan berwarna putih susu yang keluar dari sadapan pohon karet (*Hevea brasiliensis M*). Gumpalan Karet adalah lateks yang mengalami proses penggumpalan melalui cara alami (prakoagulasi) maupun penambahan bahan penggumpal dalam mangkok sadap, bak atau wadah lain.Kontaminan adalah bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses pengolahan bokar dan berpengaruh menurunkan mutu. BOKAR terdiri atas lateks kebun, sit angin, slab dan lump, pengolahan BOKAR yang dilakukan oleh UPPB harus memenuhi baku mutu. Baku Mutu yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut

Baku mutu lateks kebun dinyatakan sebagai berikut :

1. Kadar Karet Kering (KKK) tidak melebihi 20 %;
2. Bersih dari benda - benda lain berupa kayu, daun dan atau kontaminan; dan berwarna putih dan berbau segar.

Baku mutu sit angin dinyatakan sebagai berikut :

1. Bahan penggumpal yang digunakan asam semut atau bahan penggumpal lain yang direkomendasikan;
2. Ketebalan lembaran sit angin untuk mutu I paling tebal 3 mm, untuk mutu II paling tebal 5 mm dan untuk mutu III paling tebal 10 mm; dan
3. Tidak terdapat kontaminan.

Baku mutu slab dinyatakan sebagai berikut:

1. Bahan dasar diperoleh dari gumpalan lumb mangkok dan atau gumpalan buatan dengan bahan penggumpal asam semut;
2. Gumpalan digiling atau dikempa untuk mengeluarkan air / serumnya;
3. Ketebalan slab mutu I paling tebal 50 mm, untuk mutu II paling tebal 100 mm dan untuk mutu III paling tebal 150 mm;
4. Tidak mengandung kontaminan; dan
5. Selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau terkena sinar matahari langsung.

Baku mutu lump dinyatakan sebagai berikut:

1. Tidak mengandung kontaminan;
2. Ketebalan lump mutu I paling tebal 50 mm, untuk mutu II paling tebal 100 mm dan untuk mutu III paling tebal 150 mm; dan
3. Selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau terkena sinar matahari langsung.
4. **Pemasaran Bokar**

UPPB menerima BOKAR dari petani anggota yang selanjutnya diadministrasikan dan disimpan di gudang UPPB untuk dipasarkan. Untuk memasarkan BOKAR milik anggota kelompok yang dikuasakan kepada UPPB, pengurus UPPB dapat menjalin kerjasama dan transaksi langsung dengan Perusahan Daerah dan/atau pabrik pengolah, pedagang BOKAR dan/atau pelelangan.

Kerjasama dan transaksi langsung dapat dilakukan melalui kontrak jual beli dengan Perusahan Daerah dan/atau pabrik pengolah, pedagang BOKAR dan/atau pelelangan. Kerjasama dan transaksi langsung dengan Perusahan Daerah Perusahaan Daerah dapat memberikan uang muka pekerjaan kepada UPPB sebagai jaminan pembelian BOKAR dengan mutu yang ditentukan. Uang Muka diperhitungkan dalam pembayaran harga BOKAR. UPPB yang menerima uang muka berkewajiban menjual seluruh hasil pembelian BOKAR petani anggota kepada Perusahan Daerah. UPPB wajib melaporkan realisasi pembayaran BOKAR petani anggota, realisasi penjualan BOKAR dan realisasi penerimaan dana dari Perusahan Daerah.

Perdagangan dan pengangkutan BOKAR dari Lokasi menuju lokasi gudang pembeli, harus dilengkapi Surat Keterangan Asal-BOKAR atau SKA-B yang diterbitkan oleh UPPB bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa setempat. Perdagangan BOKAR tanpa disertai dokumen SKA-B harus ditolak oleh pihak pembeli baik pabrik pengolah BOKAR, pedagang BOKAR dan/atau pelelangan karena tidak ada suatu jaminan mutu BOKAR. Perusahaan Daerah menerima BOKAR hasil pembelian dari UPPB di gudang penumpukan BOKAR milik UPPB. Gudang penumpukan BOKAR UPPB harus memenuhi Standar yang ditetapkan bersama antara Perusahaan Daerah dengan UPPB.

Harga BOKAR yang diperdagangkan berpedoman pada harga CNF Pabrik Crumb Rubber yang bekerjasama dengan Perusahaan Daerah. Harga BOKAR berdasarkan atas harga Internasional dikurangi biaya operasional pabrik, biaya eksport dan lain-lain yang besarnya akan diinformasikan lebih lanjut. Harga BOKAR adalah merupakan perkalian antara kadar karet kering (K3) BOKAR dengan harga CNF Pabrik. Harga BOKAR di tingkat UPPB menggunakan rumus persentase kadar karet kering (K3) dikalikan dari harga Pabrik. Informasi harga yang berlaku di tingkat Internasional bersumber pada berita media cetak, elektronik dan internet yang terjangkau di daerah setempat. Pabrik Crumb Rubber wajib menginformasikan perkembangan harga karet pada UPPB dan/atau Perusahaan Daerah. Setiap hari UPPB wajib menyampaikan informasi harga penjualan BOKAR kepada masyarakat pekebun dengan cara menempelkan di papan pengumuman UPPB setempat.

UPPB dilarang menjual belikan BOKAR yang berasal dari luar Kabupaten Tanah Bumbu.UPPB dilarang memperjualbelikan dokumen SKA-B kepada pihak lain

1. **Pembinaan dan Pengawasan**

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu BOKAR yang dihasilkan petani, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas yang membidangi perkebunan melakukan pembinaan kepada pekebun secara terjadwal melalui kegiatan UPPB. Pembinaan dapat berupa kunjungan penyuluhan, pelatihan petani, evaluasi, pendampingan, pemberian STR-UPPB, pemberian bantuan fasilitas peralatan dan bahan pembeku. Pemerintah Daerah dapat memberikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah yang ditunjuk untuk melakukan jual beli BOKAR milik UPPB.

Pengawasan perdagangan dan peredaran BOKAR dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas yang membidangi perkebunan dan/atau Dinas yang membidangi Perdagangan. Pedagang BOKAR dan/atau pabrik pengolahan karet dapat menyampaikan ketidakpuasan terhadap mutu BOKAR yang diterima dengan menembuskan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas yang membidangi perkebunan terhadap hasil kinerja UPPB dalam menghasilkan BOKAR dibawah baku mutu yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas yang membidangi perkebunan akan melakukan pembinaan. Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap peredaran dan perdagangan BOKAR.

**H. Keterampilan**

**1. Definisi Keterampilan**

Pada dasarnya keterampilan merupakan hal yang bersifat individual.setiap individu akan memiliki tingkat keterampilan yang berbeda tergantung pada kemampuan dan pengalamannya. Keterampilan memiliki manfaat yang besar bagi individu, tempat usaha/bekerja dan masyarakat .Bagi individu keterampialn dapat meningkatkan prestasinya sehingga memperoleh balas jasa yang sesuai deangan prestasinya.

Menurut Bambang Wahyudi (2012 : 33) Keterampilan secara umum adalah kecakapan atau keahlian untuk melakukan suattu pekerjaan hanya diperoleh dalam praktek. Keterampilan bersifat global, dalam bidang kerja apapun individu dituntut untuk memiliki keterampilan, salah satunya dalam bidang pertanian.

Keterampilan petani merupakan gambaran kemampuan petani dalam mengelola usahatani berdasarkan perencanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan teknis budidaya tanaman. Keterampilan petani menunjukan kinerja dan tanggungjawab petani dalam menjalankan usaha tani secara lebih baik dan berkesinambungan. Petani yang memiliki Keterampilan adalah mereka yang memiliki karakteristik dan perilaku terukur dalam bertindak dan bertanggungjawab pada pada usahatani yang dikerjakannya, sehingga petani itu dianggap mampu oleh masyarakat lain. Petani yang berketerampilan adalah petani yang memiliki kemampuan teknis dan kemampuan manajerial dalam melaksanakan usahatani. Kemampuan teknis dari seorang petani dapat berguna dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi usahatani, sedangkan kemampuan manajerial seorang petani berguna dalam mengelola 20 usahatani dan memperoleh keuntungan. Keberhasilan petani dalam berusaha tani erat kaitannya dengan Keterampilan agribisnis yang dimiliki petani dalam mengelola usaha taninya. Keterampilan agribisnis adalah kemampuan petani untuk berpikir, bersikap dan bertindak dalam merencanakan usaha tani untuk memperoleh keuntungan berusaha tani, membangun kerjasama antar subsitem pertanian, mengelola pascapanen pangan untuk meraih nilai tambah produk pertanian, serta mewujudkan kegiatan pertanian yang berkelanjutan (Harijati, 2007).

Keterampilan kerja ini dapat dikelompokan tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

* + 1. Keterampilan mental, seperti analisa, membuat keputusan, menghitung, menghapal.
    2. Keterampilan fisik, seperti keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaannya sendiri.
    3. Keterampilan social, yaitu seperti dapat mempengaruhi orang lain, komunikasi, menawarkan barang, dan lain-lain.

Begitu juga pernyataan dari *Tovey, M* (dalam Irianto, 2001:76) mengartikan skill tidak hanya berkaitan dengan keahlian seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat tangible. Selain physical, makna skill juga mengacu pada persoalan mental, manual, motorik, perceptual dan bahkan social abilities seseorang.

**2 Dasar ketrampilan**

Menurut *Robbins* (2000 : 494-495) pada dasarnya ketrampilan dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. *Basic literacy skill*

Keahlian dasar merupakan keahlian seseorang yang pasti dan wajib dimiliki oleh kebanyakan orang, seperti membaca, menulis dan mendengar.

1. Technical skill

Keahlian teknik merupakan keahlian seseorang dalam pengembangan teknik yang dimiliki, seperti menghitung secara tepat, mengoperasikan komputer.

1. *Interpersonal skill*

Keahlian interpersonal merupakan kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja, seperti pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas dan bekerja dalam satu tim.

1. *Problem solving*

Menyelesaikan masalah adalah proses aktivitas untuk menajamkan logika, beragumentasi dan penyelesaian masalah serta kemampuan untuk mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif dan menganalisa serta memilih penyelesaian yang baik.

Tolak ukur keterampilan tidak ada yang mutlak .Oleh karena itu tingkat keterampialn kerja karyawan dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu :

1. Kecakapan ( *ability*)

2. Pengalaman (*experience*)

Kedua faktor diatas dapat dikatakan sebagai tolak ukur dalam menentukan tingkat keterampilan kerja yang dimiliki oleh seseorang .Jadi .kecakapan dan pengalaman merupakan hal yang membentuk keterampialn seseorang.

**3 Jenis Jenis Keterampilan**

*Robert L katz* yang dikutip oleh Ulber Silalahi (2002;56), mengidentifikasikan tipe-tipe dasar keterampilan ,yaitu :

1. Keterampilan Teknik (*technical skills*)

Keterampilan teknik merupakan kompetensi spesifik untuk melaksanakan tugas atau kemampuan menggunakan teknik-teknik, alat-alat, prosedur – prosedur dan pengetahuan tentang lapangan yang dispesialisasi secara benar dan tepat dalam pelaksanaan tugasnya .

1. Keterampilan Administratif

Keterampilan administartif merupakan kemampuan untuk megurus ,mengatur, dan mencatat informasi tentang pelaksanaan dan hasil yang dicapai serta berbagai hambatan-hambatan yang dialami maupun kemampuan mengikuti kebijakan dan prosedur.

1. Keterampilan Hubungan Manusia

Keterampilan hubungan manusia adalah kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain, sebagai individu atau dalam kelompok, kemampuan ini berhubungan dengan menciptakan dan membina hubungan yang baik, memahami orang lain, memberi motivasi dan bimbingan, dan mempengaruhi.

1. Keterampilan konseptual

Keterampilan konseptual adalah kemampuan mengkoordinasi dan mengintergrasi semua kepentingan kepentingan dan aktifitas–aktifitas organisasi atau kemampuan mental mendapatkan, menganalisa dan interpretasi informasi yang diterima dari berbagai sumber. Ini mencakup kemampuan melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan ,memahami bagaimana hubungan antar unit atau bagian secara keseluruhan, memahami bagaimana bagian-bagian tergantung pada yang lain, dan mengantisipasi bagaimana suatu perubahan dalam tiap bagian akan mempengaruhi keseluruhan. kemampuan melihat gambaran keorganisasian secara keseluruhan dengan pengintegrasian dan pengkoordinasian sejumlah besar aktivitas – aktivitas merupakan keterampilan konseptual.

1. Keterampilan Diagnostik

Keterampilan diagnostik berhubungan dengan kemampuan untuk menentukan melalui analisa dan pengujian hakekat dan circumtances dari suatu kondisi – kondisi khusus.Singkatnya keterampilan diagnostik dapat dimaknakan sebagai kemampuan secara cepat mendapatkan sebab yang benar dari suatu situasi tertentu melalui satu data yang simpangsiur, observasi dan fakta – fakta.